



AGUSTUS TARGETKAN 10 PRODUK HUKUM

Reses Selesai, Dewan Kebut Raperda

YOGYA (KR) - DPRD Kota Yogya kembali akan mengebut untuk pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) usai masa reses selesai. Hingga Agustus mendatang, ditargetkan ada 10 produk hukum yang sudah selesai dibahas dan berhasil diundangkan menjadi lembaran daerah.

Ketua DPRD Kota Yogya Danang Rudiymoko, mengungkapkan tahun ini terdapat 15 raperda yang masuk dalam Program Pembuatan Peraturan Daerah (Propemperda). Dari 15 raperda tersebut terdapat tiga raperda yang masuk kategori pendelegasian atau wajib karena berkaitan dengan anggaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. "Sehingga ada

dua belas raperda yang sifatnya non pendelegasian. Sampai Agustus besok kita targetkan sepuluh raperda di antaranya sudah selesai," tandasnya usai rapat paripurna pembukaan masa sidang, Jumat (3/6).

Rapat paripurna pembukaan masa sidang tersebut digelar setelah masa reses anggota dewan sejak 27 Mei hingga 2 Juni diselesaikan. Hasil penjaring-

an aspirasi dari kegiatan reses lantas akan dimasukkan dalam pokok pikiran dewan sebagai masukan rencana kegiatan pada tahun depan.

Danang menambahkan, hingga saat ini pihaknya sudah menyelesaikan enam raperda. Akan tetapi prosesnya masih menunggu hasil fasilitasi dari Pemda DIY atau Gubernur sebelum diundangkan menjadi lembaran daerah. "Kita kejar betul nanti sampai akhir Agustus. Kalau target itu tidak tercapai maka kita tidak bisa menambah atau mengupdate, karena sudah mulai membahas APBD perubahan," imbuhnya.

Di samping itu pihaknya masih menunggu petunjuk

teknis atau arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyesuaian sejumlah raperda usai disahkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Mulai minggu depan jajarannya juga akan menggelar rapat dengan mitra kerja di eksekutif terkait rencana kerja tahun 2023.

Sementara Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH, berharap usai pembukaan masa sidang segala hal yang berkaitan dengan regulasi bisa dibahas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dirinya menegaskan raperda yang sudah direncanakan untuk dibahas menjadi pedoman bagi DPRD dan Pemkot Yogya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005